

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022, jika dilihat dari pelaksanaannya bagi masyarakat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika dilihat dari pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas belum dapat terimplementasi karena baik di Kecamatan Menteng maupun Pemerintah Kota Wilayah Administrasi belum ada pegawai penyandang disabilitas. Adapun kesimpulan dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 Bagi Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Proses penyampaian informasi dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta telah dilaksanakan secara langsung oleh instansi Kecamatan Menteng. Koordinasi tiap dinas terkait (dinas sosial) dan pihak- pihak terlibat (penyandang disabilitas) dalam kebijakan telah berjalan. Dimana Kecamatan Menteng berada dibawah Pemerintah Wilayah Administrasi Jakarta Pusat. Melalui KemenpanRB yang memiliki Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi yang telah menurunkan informasi ke setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) termasuk Kecamatan Menteng. Tapi meskipun sudah terlaksana akan tetapi dari

Kecamatan Menteng belum ada aturan turunan tentang ASN Penyandang Disabilitas karena masih menginduk ke Provinsi DKI Jakarta.

2. Pemerintah Walikota Administrasi Jakarta Pusat maupun Kecamatan Menteng masih menginduk ke Provinsi DKI Jakarta. Segala hal yang akan dibuat oleh Pemerintah Walikota Administrasi Jakarta Pusat mengikuti Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memetakan kebutuhan formasi pegawai Aparatur Sipil Negara untuk mengalokasikan formasi jabatan khusus penyandang disabilitas secara langsung. Dikarenakan proses rekrutmen semuanya berasal dari pusat dan tidak bisa mengadakan secara masing – masing.
3. Adanya koordinasi dari pihak pelayanan terpadu satu pintu yangmana memiliki tugas dalam pelayanan secara langsung kepada masyarakat umum dan penyandang disabilitas sedangkan untuk Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat berkoordinasi dengan Bagian umum dengan Subbagian rumah tangga yang berwenang melakukan pengadaan fasilitas bagi penyandang disabilitas.
4. Tersedianya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam beraktivitas di tempat kerja, baik di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat maupun di Kecamatan Menteng yang telah dibuat alur tertentu untuk dapat mempermudah pergerakan mobilitas bagi Penyandang Disabilitas.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Diusulkannya formasi jabatan fungsional khusus penyandang disabilitas di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat maupun Kecamatan Menteng. Hal ini digunakan untuk memberikan dorongan dan semangat bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pekerjaan yang sama sebagai Aparatur Sipil Negara.
2. Disediakkannya pelatihan bahasa isyarat bagi jabatan fungsional di Pemerintah Kota Wilayah Administrasi Jakarta Pusat yang bertugas memberikan pelayanan langsung bagi penyandang disabilitas.
3. Dibentuknya ruang diskusi terbuka bagi komunitas atau persatuan penyandang disabilitas khususnya di wilayah Jakarta Pusat. Hal ini digunakan sebagai ruang mendengarkan dan mendapatkan informasi terbaru di masyarakat tentang penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agovino, M., & Rapposelli, A. (2016). Disability and work: A two-stage empirical analysis of Italian evidence at provincial level in providing employment for disabled workers. *Social Indicators Research*, 125, 635-648.
- Akbar, A., Miradhia, D., & Buchari, R. A. (2022). Efektivitas Program Layanan Transjakarta Cares Bagi Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 140-151.
- Anggraini, D. F., Saefulrahman, I., & Sagita, N. I. (2021). IMPLEMENTASI FUNGSI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN MASALAH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(2), 184-194.
- Article 27 – Work and employment | United Nations Enable. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities – Articles. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-27-work-and-employment.html>
- Berlian, E. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Sukabina Press.
- Borrego, E. (2017). *Cultural competence for public managers: Managing diversity in today's world*. Routledge.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2023) Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015
- Clarkson, P. J., & Coleman, R. (2015). History of inclusive design in the UK. *Applied ergonomics*, 46, 235-247.
- DJHAM, P. A. (2022, Oktober 20). *Dirjen HAM Sampaikan Komitmen Pemerintah dalam Implementasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*. <https://ham.go.id/2022/10/20/dirjen-ham-sampaikan-komitmen-pemerintah-dalam-implementasi-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas-crpd/>
- Durlak, P. R. (2017). Disability at work: Understanding the impact of the ADA on the workplace. *Sociology Compass*, 11(5), e12475.
- Febriansyah. (2011, Mei 10). Model Implementasi Kebijakan Publik (Ripley & Franklin). *Febriansyah*. <https://febriansyahtrainer1.wordpress.com/2011/05/10/model-implementasi-kebijakan-publik-ripley-franklin/>
- Fikriansyah, ilham. (2022, Juli 27). *Disabilitas Adalah: Ketahui Jenis dan Perbedaannya dengan Difabel*. detikjabar. <https://www.detik.com/jabar/jabar->

gaskeun/d-6202145/disabilitas-adalah-ketahui-jenis-dan-perbedaannya-dengan-difabel

Hariyanti, K., & Sukmana, H. (2022). Strategi Dinas Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 949-957.

Haryanti, R. H., & Sari, C. (2017). Aksesibilitas Pariwisata Bagi Difabel di Kota Surakarta (Studi Evaluasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan). *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 85-96.

Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kota Serang). *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).

Hasmiati, H., Fatmawati, F., & Usman, J. (2015). Peran Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tubuh di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 1(3).

Heron, R. (2022). *Analisis Posisi Pekerjaan dan Pekerjaan, Pedoman untuk Mengidentifikasi Posisi Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas*.

Heymann, J., Stein, M. A., & de Elvira Moreno, M. R. (Eds.). (2014). *Disability and equity at work*. Oxford University Press, USA.

International Labour Organization. (2019). Promoting Employment Opportunities for People with Disabilities: Quota Schemes.

Jetha, A., Shamaee, A., Tompa, E., Smith, P., Bültmann, U., Bonaccio, S., ... & Gignac, M. A. (2023). The future of work in shaping the employment inclusion of young adults with disabilities: a qualitative study. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 42(9), 75-91.

*Jumlah Pekerja Disabilitas Indonesia Meningkat pada 2022, Didominasi Laki-laki* / *Databoks*. (t.t.). Diambil 24 Oktober 2023, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/22/jumlah-pekerja-disabilitas-indonesia-meningkat-pada-2022-didominasi-laki-laki>

LAPORAN PROVINSI DKI JAKARTA RISKESDAS 2018 (2019). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Lang, R., Schneider, M., Kett, M., Cole, E., & Groce, N. (2019). Policy development: An analysis of disability inclusion in a selection of African Union policies. *Development Policy Review*, 37(2), 155-175.

- Lamichhane, K. (2015). *Disability, education and employment in developing countries*. Cambridge University Press.
- Lindsay, S., Cagliostro, E., Albarico, M., Mortaji, N., & Karon, L. (2018). A systematic review of the benefits of hiring people with disabilities. *Journal of occupational rehabilitation*, 28, 634-655.
- Lindsay, C., & Houston, D. (Eds.). (2013). *Disability benefits, welfare reform and employment policy*. Springer.
- Lindsay, S., Stinson, J., Stergiou-Kita, M., & Leck, J. (2017). Improving transition to employment for youth with physical disabilities: protocol for a peer electronic mentoring intervention. *JMIR Research Protocols*, 6(11), e8034.
- Masadhe, A. R., Sjamsuddin, S., & Amin, F. (2021). Manajemen Pelayanan Kampus Inklusif (Studi pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 95-101.
- Nuraeni, A., Nurasa, H., & Widianingsih, I. (2022). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kota Bandung. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 319-323.
- Nurhidayati, S., & Yakin, H. (2020). PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong). *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 1(1), 13-20.
- Paikah, N. (2019). Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas di Kabupaten Bone. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16(1), 335-348.
- Pedoman, I. L. O. (2013). Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja. *Jakarta: ILO Katalog*.
- Ramadhan, M. A., Heryani, A., & Ramdani, A. (2022). ADAPTIVE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN DISABILITAS DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 239-251.
- Ridlwan, Z. (2013). Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Rohmah, M., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUOTA PEKERJA PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(3), 421-438.

Rohman, Y. F. (2019). Tantangan Bagi Penyandang Disabilitas Penglihatan dalam Mengakses Pekerjaan. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(1), 51-66.

Sani, R. R., Prasajo, E., & Atmoko, A. W. (2019). A Model of Multi-Layered Collaborative Governance for the Management and Restoration of the Ciliwung Watershed Ecosystems. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 27.

Shaleh, I. (2018). Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63-82.

Shay, A. (Ed.). (2018). *Assistive technology service delivery: a practical guide for disability and employment professionals*. Academic Press.

Strauser, D. R. (2013). *Career development, employment, and disability in rehabilitation: From theory to practice*. Springer publishing company.

Thornton, P. (1998). Employment quotas, levies and national rehabilitation funds for persons with disabilities: Pointers for policy and practice.

Trimaya, A. (2018). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(4), 401-409.

Tuan, L. T., Rowley, C., Khai, D. C., Qian, D., Masli, E., & Le, H. Q. (2021). Fostering well-being among public employees with disabilities: the roles of disability-inclusive human resource practices, job resources, and public service motivation. *Review of Public Personnel Administration*, 41(3), 466-496.

Undang - Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2

Undang- undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang - undang nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak- hak Penyandang Disabilitas)

Von Schrader, S., Malzer, V., & Bruyère, S. (2014). Perspectives on disability disclosure: the importance of employer practices and workplace climate. *Employee Responsibilities and Rights Journal*, 26, 237-255.

Wicaksono, F., Nugraha, Y. R., Sumpena, D. D., & Surya, I. A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pemenuhan Kuota 1% Pekerja Penyandang Disabilitas Melalui Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kota Bandung. *10 No. 1*, 279-288.

Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83-91.